

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 12 TAHUN 2011  
TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)  
(STUDI KASUS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6  
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK)**

Implementation of President Instruction Number 12 in year 2012  
about Prevention and annihilation of narcotics abusing and its illegal distributing  
(A Case Study in SMA N 6, East Pontianak, Pontianak City)

**Sukandar<sup>1</sup>, Julia Magdalena Wuysang<sup>2</sup>, Sabran Achyar<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Hasil survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia yakni 3.362.519 orang atau tingkat prevalensinya meningkat dari 1,75 % pada tahun 2004 menjadi 1,9 % dari total populasi. Jumlah penyalahguna tersebut dipetakan sebanyak 1.355.050 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kota Pontianak menduduki peringkat ke-1 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 62 kasus yang terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2010 sebanyak 36 kasus terjadi di Kecamatan Pontianak Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni dengan menerbitkan dan mengimplementasikan Inpres No. 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Sumber informasi adalah guru BK, siswa SMA N 6, kader anti narkoba, Kepala Sekolah, Kepala BNN Kota Pontianak, Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak. Proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang kurang maksimal dan ketersediaan sarana informasi yang berupa leaflet, poster serta buku petunjuk P4GN sangat terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa yaitu *faktor komunikasi*, sosialisasi kebijakan ini belum terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah, *faktor sumber daya*, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Pontianak, *faktor disposisi*, sikap dan motivasi petugas penyuluh lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, *faktor struktur birokrasi*, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang menimbulkan multi tafsir.

**Kata Kunci :** Implementasi , Inpres No. 12 Tahun 2011,

---

<sup>1</sup> PNS Pemerintah Kota Pontianak

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## PENDAHULUAN

### 1. Permasalahan

Berdasarkan hasil survey nasional oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, yakni berjumlah 3.362.519 orang atau tingkat prevalensinya meningkat dari 1,75 % pada tahun 2004 menjadi 1,9 % dari total populasi. Sebanyak 3.362.519 orang penyalahguna tersebut, terdistribusi sebanyak 874.255 orang sebagai kelompok coba pakai, 907.880 orang sebagai kelompok teratur pakai, dan 1.580.384 orang sebagai kelompok pencandu. Jumlah penyalahguna tersebut dipetakan sebanyak 1.355.050 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Sedangkan hasil survey Nasional oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2012 menunjukan peningkatan pula jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebanyak 4,2 juta orang salahgunakan narkoba. (BNN Desember 2012). Prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja sebesar 4,7 persen dengan perbandingan 5,4 persen laki-laki dan 3,6 persen perempuan. Selain itu BNN merilis rekapitulasi barang bukti narkoba yang berhasil diungkap diantaranya sabu 79,24 kg, ganja 315,34 kg, kokain 858,40 gram, heroin 14,41 kg, prekursor padat 50,16 kg, prekursor cair 15.818 mililiter, ekstasi 1.418.669 butir.

Berdasarkan data daerah rawan Peredaran Gelap Narkoba, Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-12 (dua belas) dari 33 Propinsi di Indonesia sedangkan Kota Pontianak menduduki peringkat ke-1 (satu) diantara Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Kalimantan Barat.

Kasus-kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Pontianak banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Dari 79 kasus yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2012 sebanyak 32 kasus atau 40,5 % terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Faktor lingkungan yang banyak terjadi tindak pidana narkoba ini dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap kehidupan masyarakat dan para pelajar di sekitar wilayah tersebut.

Adapun jenis narkoba yang banyak disalahgunakan adalah jenis ganja, shabu-shabu dan ekstasi. Ganja termasuk Narkotika golongan I yang dapat tumbuh hampir disemua tempat diseluruh dunia. Ganja adalah jenis tanaman yang dikeringkan dengan efek yang membuat pemakainya menjadi telor atau *fly*, menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu yang lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakannya.

Sedangkan shabu-shabu dan ekstasi termasuk kelompok Psikotropika. Shabu dan ekstasi termasuk golongan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*) yang dapat memacu sistem kerja pada otak. Shabu umumnya terdapat jenis bubuk, tablet, kristal bening atau cairan serta mudah larut dalam alkohol dan air.

Pemakaian shabu dalam jangka panjang dapat merusak tubuh bahkan kematian karena over dosis, menyebabkan kurang gizi, berat badan turun, dan ketergantungan psikologis. Sedangkan jika pemakaiannya dihentikan akan diikuti tidur dalam waktu lama, kemudian depresi (rasa murung). Sedangkan ekstasi berbentuk tablet atau kapsul. Ekstasi mendorong tubuh melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum, meningkatkan rasa empati dan keakraban terhadap orang-orang lain. Dosis besar ekstasi akan menyebabkan gelisah, tidak dapat diam, cemas dan halusinasi. Pemakaian ekstasi jangka panjang dapat merusak otak, bahkan menimbulkan depresi, gangguan daya ingat dan psikosis atau gangguan jiwa.

Upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu dengan menerbitkan Inpres No. 12 tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Inpres ini dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak sebagai Implementor Inpres ini khususnya di bidang pencegahan telah mensosialisasikan dan melatih guru dan siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang ada di Kota Pontianak cukup banyak yakni berjumlah 87 sekolah dengan rincian Sekolah Menengah Atas (SMA) 44 sekolah, Madrasah Aliah (MA) 15 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 sekolah. Dampak dari kurang optimalnya pelaksanaan Inpres ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan fenomena permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 khususnya di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan saya anggap riset ini penting untuk dilakukan.

## 2. Wawasan dan Rencana Pemecahan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus rencana pemecahan masalah penelitian difokuskan pada implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di SMA N 6 Kecamatan Pontianak Timur khususnya di bidang pencegahan yang meliputi : proses implementasi, pemahaman siswa, peran guru Bimbingan Konseling (BK), ketersediaan sarana informasi serta faktor-faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa.

## 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di Sekolah Menengah Atas (SMA) N 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
2. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) N 6 tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Untuk mengetahui peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam memberikan penjelasan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
4. Untuk mengetahui ketersediaan sarana informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman tentang narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya

## 4. Kajian Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang diharapkan kedua belah pihak mempunyai persepsi yang sama. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi untuk memberikan kejelasan tentang tujuan yang diinginkan. Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsisten dari ukuran dasar tentang tujuan yang dikomunikasikan memberikan gambaran yang jelas sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari tujuan itu

Dalam proses komunikasi kebijakan, Gerge Edwards III (dalam Winarno, 2002 : 126) membahas tiga hal penting yakni: transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi

### 2. Sumber daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan

konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi : staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

### 3. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin sulit.

Perbedaan pandangan antara para pembuat dan pelaksana kebijakan biasanya terjadi karena persepsi sikap berbeda, dan perbedaan ini biasanya membuat suatu celah dimana pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan pandangan yang dimilikinya.

### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Winarno (2002 : 116) struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Dalam hal ini validitas dan keahlian sangat dituntut dalam struktur-struktur yang ada dalam badan-badan administratif yaitu memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program yang mencakup ketentuan-ketentuan teknik dalam implementasi kebijakan. Apabila hal ini kurang mendukung, kemungkinan kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat saja terjadi.

## METODE

### 1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Desain penelitian studi kasus. Menurut Creswell (1998) menyatakan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Suatu obyek dapat diangkat sebagai kasus apabila obyek tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem yang dibatasi yang terikat dengan waktu dan tempat kejadian obyek. Beberapa obyek yang dapat diangkat sebagai kasus dalam penelitian studi kasus adalah kejadian atau peristiwa, situasi, proses, program dan kegiatan. Kasus di dalam penelitian studi kasus bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi, maupun telah selesai tetapi masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian.

### 2. Obyek dan Subyek Penelitian

Adapun objek penelitian ini yaitu pada aktifitas kegiatan siswa SMA N 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 6, guru Bimbingan Konseling (BK) seperti dinyatakan Sanafiah Faisal (1995 : 109) berikut : "Subyek penelitian adalah sesuatu yang menunjukkan pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (khusus yang diteliti)".

Dalam penelitian ini penulis menentukan subyek penelitian dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan pangkal dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak untuk mengetahui proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 dan Kepala Sekolah SMA N 6 sebagai target group dari implementasi inpres ini. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah siswa dan guru bimbingan konseling (BK) SMA N 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dilaksanakan dengan didukung alat observasi, yaitu catatan-catatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan pencatatan dilakukan saat pengamatan berlangsung.

Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada

subyek penelitian, guna pengumpulan data primer dengan mengacu pada suatu daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana data yang telah didapat dipahami secara lengkap baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya kemudian dilakukan penganalisaan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan mendalam atas berbagai fokus penelitian. Dari pemahaman yang jelas dan mendalam tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (1992 :15-20) dengan prosedur : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data (Miles dan Huberman 1992 : 16) dapat dipahami sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu analisis dengan menggolongkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diperoleh dan diverifikasi. Penyajian data dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan analisis data yang berusaha menyusun data atau informasi baik dalam bentuk teks naratif, matrik, tabel maupun bagan. Dengan penyajian data yang tepat diharapkan dapat diperoleh pemahaman informasi yang lengkap dengan jelas sehingga memungkinkan dapat memperoleh kesimpulan secara akurat.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian kegiatan analisis yang penting. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Pada tahap ini diperlukan kemampuan intelektual peneliti untuk berfikir kritis sehingga dapat menarik kesimpulan secara tepat dan kesimpulan yang diperoleh dapat diverifikasi kembali sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di Sekolah Menengah Atas (SMA) N 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah dikomunikasikan dengan baik oleh pembuat

kebijakan dalam hal ini BNN Republik Indonesia dengan para pimpinan BNN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebelum inpres ini di implementasikan dilakukan pengumpulan data awal Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Pontianak ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan koordinasi dengan instansi terkait. Setelah data terkumpul dilakukan tabulasi untuk menentukan sekolah yang akan dijadikan target group. SMA N 6 termasuk salah satu SMA yang menjadi target group implementasi Inpres ini pada tahun 2012. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan rapat kecil yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan Narkotika BNN Kota Pontianak untuk menyusun jadwal, materi, menentukan metode yang akan digunakan serta mempersiapkan sumber daya baik dana maupun tenaga penyuluh. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di SMA N 6 berupa sosialisasi, pelatihan kader dan *diseminasi informasi*. Untuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari sedangkan kegiatan pelatihan kader dilaksanakan selama 3 hari secara berturut-turut. Setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi.

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya dan metode serta penerjemahan kebijakan menjadi rencana arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

Salah satu faktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sosialisasi kepada pihak-pihak baik yang melaksanakan maupun yang dikenakan kebijakan tersebut. Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana kegiatan itu dilakukan serta apa tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas penyuluh BNN Kota Pontianak berupa tatap muka (komunikasi langsung) maupun tidak langsung.

Adapun pendapat dari Edward III menyebutkan bahwa faktor komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Disebutkan juga oleh Hoogwood dan Gunn, bahwa persyaratan untuk sebuah pelaksanaan program yang baik adalah antara lain tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, serta koordinasi dan komunikasi yang sempurna.

Kemudian perintah untuk menerapkan kebijakan harus diteruskan kepada aparat dan perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Dalam organisasi, sangat mungkin ditemui atau

terjadi suatu kondisi dimana pesan kurang dapat dipahami oleh pelaksana sehingga sulit mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi demikian bisa disebabkan karena sumber informasi yang berbeda sehingga memberikan beberapa interpretasi yang saling bertentangan. Disamping itu ketidakjelasan petunjuk dan lemahnya tingkat pemahaman implementor akan sebuah petunjuk juga menjadi penyebab kurang dipahaminya pesan

## **2. Pengetahuan dan pemahaman siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) N 6 tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.**

Salah satu strategi di bidang pencegahan adalah menjadikan siswa atau pelajar khususnya pendidikan menengah memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pola pikir ini akan terbentuk dan membudaya apabila para siswa memiliki pemahaman yang cukup tentang seluk beluk narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BNN Kota Pontianak untuk memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa diantaranya adalah dengan memberikan sosialisasi, pelatihan kader dan penyebarluasan informasi (*diseminasi informasi*) melalui media cetak seperti spanduk, poster dan buku saku P4GN. Disamping melalui media cetak penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media elektronik seperti pemutaran film bahaya narkoba sebelum kegiatan sosialisasi atau pelatihan diberikan.

Adapun upaya untuk memberikan pemahaman kepada para siswa yang dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya selalu mengingatkan siswa akan bahaya narkoba pada setiap apel pagi pada hari senin oleh pembina upacara, penyampaian materi bahaya narkoba oleh guru BK dan wali kelas serta guru agama, memberdayakan kader anti narkoba yang telah dibentuk untuk menyampaikan pesan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada teman sebayanya.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Pontianak kepada para pelajar di SMA N 6 dilakukan pada waktu penerimaan siswa baru yakni pada Masa Orientasi Siswa (MOS) pada bulan Juni dan diikuti oleh seluruh siswa baru, waka kesiswaaan dan beberapa orang guru. Pada masa orientasi ini BNN Kota Pontianak bekerja sama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 memberikan pengetahuan yang cukup tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMA N 6 Kota Pontianak selama 1 hari dengan metode ceramah dan tanya jawab.

Disamping kegiatan sosialisasi, di SMA N 6 juga dibentuk kader anti narkoba sebanyak 30 orang yang akan menjadi kepanjangan tangan BNN Kota Pontianak dalam menyampaikan pesan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman sebayanya.

Dari hasil wawancara dengan kader anti narkoba dapat dikatakan bahwa kader anti narkoba di SMA N 6 sebagai kepanjangan tangan dari BNN Kota Pontianak sudah mengimplementasikan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba namun hasil yang dicapai belum dapat dikatakan maksimal, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa siswa kelas X dan kelas XI. Mereka mengatakan mengerti apa yang dimaksud dengan narkoba dan dampaknya baik dari sisi kesehatan maupun dampak hukumnya, namun ketika mereka ditanya mengenai bentuk narkoba yang asli mereka rata-rata menjawab belum pernah melihat. Mereka hanya mengetahui bentuk dan jenis narkoba dari gambar-gambar yang ditampilkan pada waktu kegiatan sosialisasi dan poster yang ditempelkan di majalah dinding.

Adanya permasalahan menyangkut sosialisasi program sebagian besar disebabkan oleh komunikasi kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik. Sosialisasi yang lebih intensif perlu segera dilakukan dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa dalam melakukan komunikasi kebijakan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Komunikasi kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik tentu akan mengakibatkan informasi yang diterima oleh sasaran (*target group*) juga tidak akan efektif dan akan menimbulkan multi tafsir.

### **3. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam memberikan penjelasan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.**

Pada hakikatnya, peranan guru BK adalah mendampingi siswa dalam beberapa hal, antara lain dalam perkembangan belajar/akademis, mengenal diri sendiri dan peluang masa depan mereka, menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya, dan menyusun rencana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan itu, serta mengatasi masalah pribadi (kesulitan belajar, masalah hubungan dengan teman, atau masalah dengan keluarga).

Peran Guru BK diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip keseimbangan, bukan menghukum anak nakal atau bermasalah, tapi juga memberi pujian bagi anak yang berprestasi.

Dengan demikian, guru BK bisa menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk membuka diri tanpa was-was akan pribadinya.

Dari hasil penelitian mengenai peran guru BK di SMA N 6 yang mengatakan bahwa kegiatan pemberian pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan metode klasikal seharusnya dapat membantu para siswa untuk memahami akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun pada kenyataannya masih ada siswa yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba secara utuh terutama pada bentuk atau wujud asli dari barang tersebut. Adapun kondisi ini lebih dikarenakan guru BK yang ada di SMA N 6 juga merangkap sebagai guru mata pelajaran. Disamping itu beban tugas yang harus dipikul juga tidak sebanding dengan siswa yang harus dilayani. Adapun jumlah guru BK di SMA N 6 berjumlah 3 orang, 1 orang sedang mengikuti pendidikan S2. Sedangkan jumlah murid di SMA N 6 mencapai 577 siswa. Berdasarkan analisis kebutuhan guru seharusnya guru BK yang ideal berjumlah 4 orang (dapat dilihat pada tabel 4.2). Kondisi seperti ini menyebabkan guru BK tidak dapat bekerja secara maksimal dikarenakan kelebihan jam mengajar. Adapun untuk melakukan Bimbingan dan Konseling kepada murid yang bermasalah sudah disediakan ruang yang cukup representatif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa sumber daya memiliki peranan yang penting untuk mendukung keberhasilan program yang akan dijalankan. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan prasarana.

Dari hasil penelitian sumber daya tenaga penyuluh yang ada di BNN Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak masih belum mencukupi. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana

program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

#### **4. Ketersediaan sarana informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.**

Dari hasil observasi di lapangan BNN Kota Pontianak telah mengirimkan spanduk, poster dan buku saku P4GN untuk menunjang pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Spanduk dan poster yang telah dikirim dipasang oleh pihak sekolah di tempat yang strategis. Adapun mengenai buku saku P4GN diletakkan di ruang perpustakaan namun jumlahnya memang masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.

Dari hasil penelitian diatas sarana informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tersedia di SMA N 6 di dominasi oleh media non elektronik seperti leaflet, brosur dan buku P4GN dalam jumlah terbatas. Keterbatasan sarana informasi ini menyebabkan siswa kurang dapat mengakses informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara utuh.

Informasi adalah benda abstrak yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan positif dan atau sebaliknya. Informasi dapat mempercepat atau memperlambat pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi memiliki kekuatan, baik yang membangun maupun yang merusak. Dalam prakteknya, informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk baik lisan (*oral*), tercetak (*printed*), audio, maupun audio-visual gerak yang masing-masing memiliki ciri khas, kelebihan dan kekurangan.

Keanekaragaman kreatifitas, inovasi serta kecepatan penyediaan informasi sebagaimana halnya informasi tentang program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sangat diperlukan. Selain itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam mengelola dan melayani masyarakat khususnya pelajar sebagai pemakai informasi, serta cepat tanggap terhadap perkembangan kebutuhan, sehingga dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan di bidang sarana teknologi informasi dan telekomunikasi.

Komunikasi antar manusia di dalam masyarakat mempunyai proses yang jelas, baik

proses secara primer maupun proses secara sekunder. Proses komunikasi secara primer tidak lain adalah proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung, tatap muka antara komunikator dengan komunikan. Adapun komunikasi secara sekunder adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan dengan menggunakan media kedua setelah bahasa.

Berdasarkan kriteria umum, kegiatan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan dikelompokkan kedalam tiga tipe yaitu :

1. Tipe Diseminasi Informasi Pasif seperti jasa pembaca, pemakaian pustaka, meja informasi.
2. Tipe Diseminasi Informasi Responsif seperti sirkulasi atau peminjaman, penggandaan pustaka, penelusuran bahan informasi.
3. Tipe Diseminasi Informasi Proaktif seperti jasa kesiagaan dan penyebaran informasi terseleksi serta pengemasan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Untuk kebutuhan penyebarluasan atau diseminasi dan kebutuhan masyarakat termasuk para pelajar akan informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ketiga diseminasi informasi di atas perlu dilaksanakan.

#### **5. Hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman tentang narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya.**

Hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman tentang narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya disebabkan oleh:

1. Faktor komunikasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Menurut Edward III tiga variabel tersebut yaitu: Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi

Inpres Nomor 12 Tahun 2012 telah ditransmisikan dengan baik oleh pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam mengimplementasikan inpres tersebut berpedoman pada rencana aksi yang telah dibuat baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana aksi ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan secara konsisten dilaksanakan selama lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dalam mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba tahun 2015. Sebagai tolak ukur dari keberhasilan program, rencana aksi yang telah dibuat dilengkapi dengan indikator kinerja dari masing-masing kegiatan.

Mengingat kompleksitas dari kebijakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba implementasi inpres ini belum dapat berjalan secara maksimal. Dibutuhkan komitmen dan

konsistensi dari aparat pelaksana kebijakan terutama pihak implementor dalam mengimplementasikan inpres ini. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Edward III yang mengatakan bahwa ada enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Salah satu dari faktor tersebut yaitu kompleksitas kebijakan publik.

## 2. Faktor Sumber-sumber

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dalam kaitannya dengan sumber daya, ada tiga faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana

Dari hasil penelitian di atas sumber daya tenaga penyuluh yang ada di BNN Kota Pontianak masih belum mencukupi. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 2007 : 194) bahwa : “sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan sosial masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan nafa antara lain adanya kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan penguatan institusi pendidikan. Misalkan saja, berdasarkan pandangan teori konflik dapat diperkirakan bahwa beberapa kelompok mempunyai kepentingan tertentu dengan adanya kantung-kantung “pengguna nafa” karena dengan adanya kantung-kantung tersebut persediaan barang haram tetap tersedia, sehingga pada kelompok kepentingan tertentu niat untuk mengembangkan suatu masyarakat menjadi mendua karena adanya kepentingan tertentu yang bertentangan prinsip dasar untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Data primer diolah, Juli 2012).

## 3. Faktor Disposisi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dukungan dari aparat dan birokrasi pelaksana terlihat dari adanya dedikasi yang tinggi dari petugas pelaksana di lapangan, terutama dalam memberikan motivasi, pembinaan dan penyuluhan kepada target group guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelajar akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sikap dari pelaksana kebijakan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yakni salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

## 4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antar unit kerja dalam organisasi. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standar operasional prosedur (SOP). Pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan pencegahan pembarantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.



SOP merupakan perangkat organisasi yang berperan untuk memberikan acuan tindakan yang sesuai standar bagi para pelaksana kebijakan, sehingga setiap pelaksana kebijakan akan melaksanakan tindakan secara terkoordinir dan terarah sebagai upaya pencapaian kebijakan.

Dari hasil penelitian di atas dapat dikatakan struktur birokrasi yang ada di BNN Kota Pontianak masih belum sempurna. Adanya struktur organisasi yang belum terisi (bidang pemberantasan) menjadi salah satu penghambat untuk mensinergikan program yang akan dijalankan dengan unit-unit terkait. Inpres No. 12 tahun 2011 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang utuh dan saling bersinergi yang diwujudkan dalam suatu rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan perlu didukung dengan SOP (*Standar Operating Procedure*) yang jelas dan dapat diterjemahkan secara matang oleh implementor.

SOP sebagai alat mencapai efektifitas koordinasi dalam manajemen internal. SOP merupakan serangkaian panduan teknis yang berisi aliran dan proses kerja dari suatu organisasi. SOP merupakan panduan teknis yang berisi serangkaian instruksi yang menggambarkan aktivitas dan proses kegiatan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam organisasi. SOP berfungsi memberikan kejelasan dalam siapa dan apa yang harus dilakukan serta persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam proses kegiatan tersebut. Penyusunan SOP dengan baik tentunya akan mengurangi tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, SOP tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam proses evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi dan standar keberhasilan.

## PENUTUP

Proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2012 di SMA N 6 Kecamatan Pontianak Timur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM dan sumber dana yang ada di BNN Kota Pontianak bila dibandingkan dengan jumlah sekolah

(SD,SMP,SMA) yang ada di Kota Pontianak sehingga sulit untuk melakukan pembinaan secara terus menerus.

Belum semua siswa SMA N 6 memiliki pemahaman yang baik mengenai narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya terutama mengenai wujud atau bentuk asli narkoba yang selama ini beredar dipasaran, rendahnya pemahaman siswa ini dikarenakan kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor.

Peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam memberikan penjelasan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah dilakukan dengan metode klasikal namun pelaksanaannya belum maksimal, tidak tersedianya alat bantu merupakan salah satu kendala dalam memberikan pemahaman kepada siswa, disamping itu belum semua guru BK mengikuti pelatihan tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang diadakan oleh BNN Kota Pontianak.

Ketersediaan sarana informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berupa *leaflet*, poster serta buku petunjuk P4GN masih sangat terbatas baik dipergustakaan maupun yang ditempel di tempat-tempat strategis, misalnya dimajalah dinding dan ruang kelas, keterbatasan sarana informasi ini menyulitkan siswa untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman tentang narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya disebabkan *faktor komunikasi*, sosialisasi kebijakan ini belum terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah yang ada di Kota Pontianak, *faktor sumber daya*, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Pontianak, *faktor disposisi*, sikap dan motivasi petugas penyuluh lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebgaiian besar masih terpaku untuk menyelesaikan kegiatan dan kurang melakukan tindakan yang proaktif, dan yang terakhir yaitu *faktor struktur birokrasi*, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang menimbulkan multi tafsir juga menjadi faktor penghambat implementasi inpres ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional, 2007, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.  
-----, 2008, *Petunjuk Teknis Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat*.

- , 2010, *Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat*.
- , 2011, *Prosedur Kerja Standar Diseminasi Informasi P4GN Bidang Pencegahan Melalui Media Elektronik*.
- , 2011, *Prosedur Kerja Standar Diseminasi Informasi P4GN Bidang Pencegahan Melalui Media Non Elektronik*.
- Creswell, John, W. 1998, *Qualitatif Inquiri And Research Design: Choosing Among Five Traditions*, London: SAGE Publications.
- Dunn. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, diterjemahkan oleh Wibowo, dkk, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Faisal, Sanafiah. 1990, *Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- , 2002, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali.
- Fatilima, Hamid. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Jones, Charles, O. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jim ife, F. Tesoriero, 2008, *Alternatif Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta Fakultas Ekonomi UI
- Little, John dan Karen, 2009, *Teori Komunikasi*, Jakarta, Salemba Humanika
- Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif: "Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya"*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2000, *Komunikasi Organisasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 1999, *Pengaruh Kebijakan Publik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryati, 2002, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Aksara Baru
- Nasution, S. 1998, *Metode Penelitian Natural-Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Puslitkes, 2010, *Survey Nasional Pencegahan, Penyalahgunaan Nafza*, Depok Bandung Universitas Indonesia
- Ritzer, George. 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali.
- Ritzer, George and J. Goodman, Douglas. 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media
- Rukminto, Adi. 2003, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Depok Bandung Fakultas ekonomi Universitas Indonesia
- Santrock, J.W. 2003, *Adolescence (Perkembangan Remaja)*, Terjemahan, Jakarta: Erlangga.
- Soeprapto, H.R. Riyadi. 2002, *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Averro Press.
- Soetomo, 2010, *Strategi- Strategi Pembangunan Masyarakat*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sutaryo, 2005, *Sosiologi Komunikasi, Perspektif Teoritik*, Jogjakarta, Arti Bumi Intaran
- Tachjan. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi, S. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Transformasi pikiran George Edward, Yogyakarta : Lukman Offset.
- Thoha, Miftah, 1997, *Pembinaan Organisasi, Proses diagnose dan intervensi*, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Umar, Husein, 2003, *Metode Riset Perilaku Organisasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wibawa, Samodra. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- , 1994, *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Jakarta: Media Presindo.
- Dokumen Pemerintah :**  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional (Jaktranas) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).